Transaksi Elektronik Illegal Pada Platform Marketplace Tokopedia

Muhammad Permana Shidiq, Sigid Suseno, Tasya Safiranita

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email : permanashidiq12@gmail.com; sigid.suseno@unpad.ac.id;
tasya_safiranita@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada kegiatan jual beli yang pada saat ini dikenal dengan istilah transaksi elektronik. Dalam kegiatannya transaksi elektronik ini sering dijumpai di dalam suatu *platform marketplace* salah satunya Tokopedia. Disamping kemudahan yang di dapat, ternyata kegiatan transaksi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan latar belakang, sehingga di dalam penelitian ini muncul dua permasalahan, pertama bagaimana kebijakan hukum pidana pengaturan transaksi elektronik *illegal* di Indonesia, dan di komparasi dengan singapura, serta bagaimana bentuk tanggungjawab dari *marketplace* Tokopedia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana pengaturan transaksi elektronik *illegal* yang terjadi serta bentuk tanggungjawab dari *marketplace* Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti dengan melakukan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk menganalisis terkait dengan kebijakan hukum pidana pengaturan transaksi elektronik *illegal* melalui *platform* Tokopedia dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana pengaturan transaksi elektronik *illegal* melalui *platform* Tokopedia dalam sistem hukum pidana Indonesia pada saat ini belum memiliki kebijakan dan ketentuan yang khusus untuk mengatur mengenai perbuatan transaksi elektronik *illegal*. Serta dalam hal ini Tokopedia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana Surat Edaran KOMINFO Nomor 5 Tahun 2016 serta *terms and condition* yang dimiliki oleh Tokopedia.

Kata Kunci: Transaksi Elektronik, Kebijakan Hukum Pidana, Tanggungjawab Hukum

PENDAHULUAN

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang berulang kali dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan dari orang tersebut. Kebiasaan tersebut dapat berupa norma baru terutama dalam perkembangan arus informasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan teknologi. Berbagai penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang menggunakan internet melalui komputer pribadi (*personal computer/PC*) atau media elektronik lainnya dimanapun dan kapanpun. Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia tersebut telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan manfaat bagi manusia dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Sigid Suseno, 2012, p. 1). Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas seperti: pendidikan, kesehatan, bisnis, komunikasi dan hiburan. Akan tetapi disamping kemudahan-kemudahan itu tentu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu kejahatan baru yang terkoneksi atau terhubung langsung dengan perangkat komputer atau internet, kejahatan tersebut dapat dinamakan dengan *cybercrime* atau dapat disebut dengan tindak pidana yang bermuatan siber. Salah satu yang perlu dicermati terkait munculnya suatu tindak pidana baru

dalam dunia siber ialah bagaimana kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam hal jual beli online, karena pada saat ini masih saja ditemukan suatu permasalahan yang terjadi didalam kegiatannya tersebut yaitu resiko berupa adanya tindak kejahatan baik berupa suatu penipuan ataupun pembelian dan penjualan produk yang tidak dibenarkan oleh hukum atau tidak sah yang dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun penjual barang tersebut.

Transaksi elektronik di definisikan sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Akan tetapi jika dalam kegiatan transaksi elektronik tersebut ada unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan atau merugikan seseorang atas kegiatan tersebut maka transaksi elektronik tersebut dapat dikatakan sebagai transaksi elektronik *illegal*, yang dimaksud dengan transaksi elektronik *illegal* ialah persetujuan jual beli yang dilakukan antara dua belah pihak melalui media internet atau komputer yang tidak sah atau tidak dibenarkan oleh hukum.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain (Aswan, 2019, p. 64-64) :

- a. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku;
- b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha atau *merchant*;
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
- d. *Platform/Provider* sebagai penyedia jasa layanan transaksi elektronik melalui akses internet.

Kemajuan teknologi memang tidak dapat dihindari begitu juga pesatnya perubahan kegiatan dan kebiasaan yang ada di masyarakat, salah satunya ialah kegiatan jual beli yang biasa dilakukan secara langsung dan ditempat, berubah perlahan menjadi berbentuk online yang dalam praktiknya saat kegiatan tersebut dilakukan tidak perlu bertemu secara langsung antara pembeli dan penjual dan untuk pembayarannya pun dapat melalui perantara. Salah satu bentuk nyata adanya perkembangan teknologi pada saat ini ialah hadirnya *platform marketplace*, *marketplace* adalah sebuah *website* yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Salah satu *marketplace* yang ada di Indonesia ialah *marketplace* Tokopedia. Pada saat ini ternyata banyak sekali kasus *cybercrime* yang dilakukan di *marketplace* Tokopedia terkait transaksi elektronik *illegal*. Penulis menemukan beberapa kasus antara lain : terjadi Pada tahun 2019 terkait penipuan online yang dilakukan oleh Terdakwa Jocky Chen sesuai dengan Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor : 165/Pid.Sus/2020/PN Jakarta Utara, Kasus terjadi bermula pada saat saksi Olan Christian membeli secara online memori merk *VGEN 128 GB* di aplikasi Tokopedia dengan nama *FANTASTIC IDEAS TECHOLO* di dalam keterangan toko tersebut diterangkan bahwa barang dijamin 100% original dari *VGEN*, setelah mengetahui hal tersebut saksi Olan Christian tertarik dan membeli dengan cara transfer melalui *m-banking*, setelah itu barang pesanan pun tiba, ternyata setelah saksi Olan Christian terima ia mengecek langsung memori tersebut ke dalam laptopnya ternyata ruang memori tersebut tidak sampai 128 GB, mengetahui hal tersebut saksi Olan Christian pun berniat memastikan keaslian barang tersebut ke toko pusat *VGEN* dan ternyata setelah diperiksa oleh pihak toko pusat *VGEN*, barang tersebut dapat dikategorikan barang tiruan dan bukan original. Dalam pertimbangan hakim setelah mengaitkan bukti dan fakta hukum dalam persidangan, maka hakim menyatakan terdakwa Jocky Chen terbukti telah

melakukan perbuatan “*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang ITE. Pidana Penjara 1 tahun serta denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kasus lainnya yang menyangkut transaksi elektronik *illegal* pada *platform* Tokopedia terjadi pada tahun 2019 dengan terdakwa Julian Asbjorn Beau sesuai dengan Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor : 1455/Pid.Sus/2019/PN Jakarta.Utara, ia melakukan “tindak pidana cukai” sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 39 Tahun 2007. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menjadi *reseller IQOS device, heatstick* dan Rokok Impor, ia berjualan melalui mekanisme online di Tokopedia dengan akun “*absjorn*” sejak pertengahan tahun 2017 yang dikelola sendiri, dan barang-barang *reseller* tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Catherine dan juga Sdr. Sucahyono. Terdakwa melakukan aksinya dengan cara membeli dan memesan kepada Sdr. Sucahyono pada *marketplace* Tokopedia dengan nama toko *MADISON’S STORE*, barang-barang tersebut terdakwa dapatkan dari toko tersebut dan ia jual kembali pada tokonya yang juga berada di Tokopedia, nyatanya barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai yang artinya barang tersebut belum terkena cukai dari bea cukai yang seharusnya terlebih dahulu barang-barang tersebut terkena biaya cukai. Dalam pertimbangan hakim setelah mengaitkan bukti dan fakta hukum dalam persidangan, maka hakim menyatakan terdakwa Julian Asbjorn Beau terbukti telah melakukan perbuatan “*melakukan tindak pidana menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai.

Dari uraian kasus diatas kita dapat melihat persamaan yakni perbuatan transaksi elektronik yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dalam kegiatannya menggunakan media *marketplace* Tokopedia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana kebijakan hukum pidana pengaturan transaksi elektronik *illegal* pada *platform* Tokopedia dalam sistem hukum pidana Indonesia serta bagaimana bentuk tanggungjawab *marketplace* Tokopedia sebagai pihak ketiga dalam hal terjadinya transaksi elektronik tersebut. Adapun nantinya manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan mengenai Hukum Pidana dalam kaitannya *Cybercrime* tentang kebijakan hukum pidana pengaturan transaksi elektronik *illegal* pada *platform* Tokopedia dalam sistem hukum pidana Indonesia dan bentuk tanggungjawab dari *marketplace* Tokopedia.
2. Dapat diaplikasikan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku transaksi elektronik jual beli online, baik dari pihak produsen sebagai penyedia barang dan juga konsumen sebagai pembeli serta penyedia tempat berjualan online yang biasa disebut sebagai *marketplace* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis sumber bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, p. 13-14). Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perbuatan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa :
 - a. Buku-buku mengenai Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana, Kebijakan Hukum;
 - b. Buku-buku mengenai Cyberlaw, Cybercrime, Transaksi Elektronik Jual Beli Online;
 - c. Tulisan para ahli hukum tentang Kebijakan Hukum kaitannya dengan Transaksi Elektronik Jual Beli Online;
 - d. Jurnal Hukum yang membahas tentang Hukum Pidana, Cyberlaw, Cybercrime, Transaksi Elektronik Jual Beli Online.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersier dapat berupa artikel, majalah maupun surat kabar yang membahas tentang Transaksi Elektronik Jual Beli Online .
4. Kepustakaan Elektronik, di dalam melakukan penelitian ini penulis juga mengumpulkan data-data dan literatur dari sumber terkait Transaksi Elektronik Jual Beli Online yang diakses melalui media internet.

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yakni menginventarisasi, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun kepustakaan elektronik (Hasan Basri, 2021, p. 108).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Pengaturan Transaksi Elektronik Illegal Pada Platform Tokopedia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini dalam transaksi elektronik tentu memerlukan suatu perhatian khusus agar kejahatan dalam transaksi elektronik tersebut tidak akan terjadi kembali, salah satu hal yang dapat dilakukan saat ini ialah dengan memperhatikan suatu peraturan hukum yang dapat mencakup segala perbuatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik agar para pelaku kejahatan dapat di berikan suatu sanksi berupa suatu hukuman atas apa yang telah dia lakukan dan dapat memberikan suatu efek jera agar perbuatan tersebut tidak dilakukannya kembali.

Seperti yang sudah di paparkan sebelumnya terkait kasus-kasus transaksi elektronik *illegal* maka dalam hal ini Negara dapat mengenakan suatu kebijakan hukum dan kebijakan yang dapat dikenakan ialah dengan menggunakan kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana, kebijakan hukum pidana ini digunakan untuk melindungi subyek hukum tertentu dari suatu perbuatan kriminal. Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum tersebut adalah dengan cara memberikan pidana/nestapa kepada pelaku. Dengan kata lain, hukum pidana memberikan aturan terhadap perbuatan jahat. Perbuatan jahat tersebut ialah merupakan perbuatan mengenai transaksi elektronik *illegal* dalam *platform marketplace* Tokopedia.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mempunyai tiga tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikatif, dan tahap eksekutif, yang akan dijabarkan dan ditekankan oleh penulis dalam penelitian ini ialah kebijakan hukum pidana pada tahap formulatif, kebijakan dalam tahap formulatif ini merupakan tahap yang paling strategis, mengutip pendapat dari Barda Nawawi Arief, ia berpendapat bahwa kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari "penal policy" karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan (Barda Nawawi Arief, 2007, p. 78-79).

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Transaksi Elektronik Illegal Penipuan Online dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem Perumusan Tindak Pidana Transaksi Elektronik Illegal Penipuan Online di dalam UU ITE

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Bab XI Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka penulis hanya akan mengidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) kaitkannya dengan kasus tindak pidana penipuan online yang sudah di paparkan sebelumnya. Adapun bunyi Pasal 45A Ayat (1) sebagai berikut : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun unsur-unsur tindak pidananya, antara lain :

- 1) *Setiap orang :*
- 2) *Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan :*
- 3) *Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektornik.*

Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Transaksi Elektronik Illegal Penipuan Online di dalam UU ITE

Pelaku tindak pidana atau yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik meliputi individu/orang per-orang dan korporasi. Ini terbukti dari ketentuan pasal-pasal tersebut yang diawali dengan kata "Setiap orang: dan Koorporasi". Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (22) dan Ayat (23) undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang dimaksud dengan orang adalah Orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dan Badan Usaha adalah Perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Sistem Perumusan Sanksi, Jenis Sanksi dan Lamanya Sanksi Pidana Transaksi Elektronik Illegal Penipuan Online di dalam UU ITE

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah alternatif kumulatif, mengingat bentuk perumusannya adalah "dan/atau".

Sistem Perumusan Jenis Sanksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Jenis-jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara dan denda.

1) Sistem Perumusan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perumusan lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- a) Maksimum khusus pidana penjara dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik paling lama 12 tahun dan paling sedikit tidak disebutkan;
- b) Maksimum khusus pidana denda berkisar antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Transaksi Elektronik *Illegal* Barang Tidak Kena Cukai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Sistem perumusan tindak pidana transaksi elektronik illegal barang tidak kena cukai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terdapat pada Bab XII Pasal 50 sampai dengan Pasal 62, adapun yang erat kaitannya dengan penjualan barang kena cukai yang tidak kena bea cukai yakni pada Pasal 54. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka penulis hanya akan mengidentifikasi perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 54 kaitkannya dengan kasus tindak pidana cukai yang sudah di paparkan sebelumnya. Adapun bunyi pasal 54 sebagai berikut : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Adapun unsur-unsur tindak pidananya, antara lain : Pasal 29 Ayat (1) :

”Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.

Unsur-unsur nya, antara lain :

- 1) *Setiap Orang;*
- 2) *Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai.*

Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana transaksi elektronik illegal barang tidak kena cukai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Pelaku tindak pidana atau yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tentang cukai meliputi individu/orang per-orang dan korporasi. Ini dapat dibuktikan dari ketentuan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut yang diawali

dengan kata “Setiap orang dan Pegusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai”. Di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa : Orang adalah orang pribadi atau badan hukum, Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik, Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.

Sistem perumusan sanksi, jenis sanksi dan lamanya sanksi pidana transaksi elektronik illegal barang tidak kena cukai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dalam undang-undang cukai adalah alternatif kumulatif, menginggit bentuk perumusannya adalah “dan/atau”.

Yang berbeda dengan rumusan sanksi dalam UU ITE dengan UU Cukai ialah terletak adanya suatu ketentuan denda yang memasukan nilai kali cukai yang terdiri dari ketentuan-ketentuan per-pasal yang dikenakan, jika merujuk kepada kasus yang penulis temukan dimana terdakwa Julain Asbjorn Beau telah melanggar ketentuan Pasal 54 dan ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kebijakan Hukum Pidana Transaksi Elektronik Illegal di Negara Singapura

Ketentuan tindak pidana siber yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana transaksi elektronik illegal di Negara Singapura terdapat di dalam *Computer Misuse Act (CMA) CHAPTER 50A Revised Edition 2007* yang merupakan undang-undang khusus untuk mengatur segala permasalahan kaitannya dengan komputer sebagai alat dari tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh salah satunya terdapat dalam bagian 4 : “Akses dengan maksud untuk melakukan atau memfasilitasi terjadinya pelanggaran”, adapun perumusan unsur-unsur perbuatannya sebagai berikut :

Bagian 4 :

- 1) Siapa pun yang menyebabkan komputer menjalankan fungsi apa pun untuk tujuan mengamankan akses ke program atau data apa pun yang disimpan di komputer mana pun dengan maksud untuk melakukan pelanggaran di mana bagian ini berlaku, harus bersalah atas pelanggaran di mana bagian ini berlaku, dia akan bersalah karena suatu pelanggaran;
- 2) Bagian ini berlaku untuk pelanggaran yang melibatkan properti, penipuan, ketidakjujuran atau yang menyebabkan cedera tubuh dan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun;
- 3) Setiap orang yang bersalah melakukan pelanggaran menurut bagian ini akan dikenakan hukuman tidak melebihi \$ 50.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun atau keduanya;
- 4) Untuk tujuan dalam bagian ini, tidak menjadi masalah apakah :
 - a) Sebuah akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah atau tidak;
 - b) Pelanggaran dimana bagian ini berlaku dilakukan pada saat yang sama ketika akses diamankan atau pada waktu lain.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, selain itu kebijakan hukum pidana juga mengandung artian bahwa bagaimana usaha negara untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat jika terjadi suatu permasalahan yang harus dikenakan oleh suatu sanksi yang tepat. Jika kita bandingkan dengan Negara Singapura, mereka memiliki beberapa kebijakan hukum pengaturan terkait permasalahan tindak pidana siber salah satunya

mengenai transaksi elektronik, yaitu *The Statutes Of The Republic Of Singapore Computer Misuse Act Chapter 50A Revised Edition 2007*.

Dari perbandingan diatas dapat terlihat bahwa Negara Singapura lebih baik terkait kebijakan hukum pengaturan mengenai transaksi elektronik karena sudah memiliki perundang-undangan khusus dibandingkan dengan Negara Indonesia yang masih menggunakan UU ITE yang bersifat umum dan juga Undang-Undang diluar UU ITE untuk menjadi payung hukum perbuatan tindak pidana yang terjadi seperti contoh kasus yang penulis temukan terkait barang kena cukai yang tidak kena cukai yang diperjual belikan melalui mekanisme toko online di Tokopedia, perbuatan tersebut dilarang dan dikenakan sanksi dengan merujuk kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Bentuk Tanggungjawab Marketplace Tokopedia Dalam Transaksi Elektronik Illegal Yang Menggunkan Platform Tokopedia

Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau dapat disebut sebagai salah satu *marketplace* yang merupakan wadah untuk kegiatan jual beli suatu barang yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Tokopedia merupakan portal *web* dengan model *Costumer to Customer* (C2C), yakni perdagangan yang dilakukan antara sesama konsumen. Kedudukan tokopedia dalam hal ini adalah penting dan vital dalam kaitannya dengan transaksi elektronik. Jika kita kualifikasikan, Tokopedia termasuk kedalam subyek hukum yang berbentuk korporasi yaitu Perseoran Terbatas (PT), karena bentuknya korporasi maka jika ingin menuntut pertanggungjawaban maka pembebanan pertanggungjawaban harus menggunakan sistem pertanggungjawaban korporasi. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Tokopedia merupakan *marketplace* yang memberikan jasa dan layanan, tentu sebagai penyedia jasa Tokopedia harus patuh terhadap aturan yang sudah dibuat oleh negara yang dalam hal ini melalui Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*OVER THE TOP*) yang menegaskan untuk para penyedia jasa untuk segera memenuhi hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh penyedia jasa dalam hal kaitannya nanti dengan kegiatan yang berlangsung yaitu kegiatan transaksi elektornik. Di dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*OVER THE TOP*) tersebut hanya menegaskan para penyedia jasa untuk bersiap diri dengan regulasi yang akan diberlakukan segera oleh pemerintah kaitannya dengan transaksi elektronik.

Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*. Di dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* terdapat beberapa pedoman bagi Penyedia Platform atau Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pedagang (*Merhcant*) dalam hal batasan dan tanggungjawabannya dalam transaksi elektronik melalui sistem elektornik (*electronic commerce*) berbentuk *User Generated Content*. Didalam Surat Edaran tersebut termuat beberapa pedoman terkait konten apa saja yang dilarang serta kewajiban dan tanggungjawab penyedia platform UGC salah satunya harus menyajikan syarat dan ketentuan bagi penggunaanya sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tokopedia yang memiliki *terms and condition* dalam hal pedoman kegiatan transaksi elektroniknya.

Tokopedia menegaskan di dalam *terms and condition* yang tercantum di dalam poin R mengenai penolakan jaminan dan batasan tanggungjawab, diantaranya adalah Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) tidak bertanggungjawab, dan anda setuju

untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung. Dengan ketentuan tersebut, maka Tokopedia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian ataupun permasalahan yang terjadi di Tokopedia sebagaimana ketentuan poin R yang sebelumnya sudah disebutkan. Bilamana Tokopedia disangkutkan terhadap permasalahan yang terjadi, Tokopedia hanya dapat menjadi suatu media untuk menerima pelaporan pelanggaran produk tersebut, untuk ditindaklanjuti oleh pihak Tokopedia baik itu berupa peringatan ataupun sanksi berupa penutupan toko.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban Penyelenggaraan Sistem Elektornik dapat dilihat juga di dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penyelenggaraan Sistem Elektronik dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) : Ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektornik bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. Tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Dengan adanya ketentuan tersebut dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* memang benar akan meminimalisir para Penyedia Penyelenggara Sistem Elektronik dari kesewenang-wenangan para pengguna yang selalu menyalahkan Penyedia Penyelenggara Sistem Elektronik atas kerugian yang mereka dapati di dalam hal transaksinya, karena kerugian tersebut sebagian besar terjadi dikarenakan kelalaian dari penjual maupun pembelinya.

Akan tetapi ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content* tersebut dapat memberikan kelonggaran bagi penyedia *platform* untuk berlepas diri atas tanggungjawabnya sebagai Penyedia Layanan Transaksi Elektronik. Akibatnya hal ini dapat meminimalisir kontrol dari penyedia *platform* terhadap konten yang diunggah oleh *user*-nya. Apalagi dengan bentuk *platform* berjenis *marketplace*, *user* memiliki keleluasaan untuk mengunggah barang dagangannya untuk ditawarkan dalam toko onlinenya tersebut. Hal inilah yang dapat menjadi permasalahan nantinya dengan penegasan tanggungjawab hukum yang diemban oleh penyedia *platform* dalam hal ini Tokopedia terhadap transaksi elektronik *illegal*.

Maka dari pada itu perlu kiranya suatu penegasan ataupun kebijakan yang baru agar terciptanya asas kepastian hukum, asas kehati-hatian dan asas iktikad baik sebagaimana dikehendaki dan tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disamping itu, harus juga ada peran dari setiap para pelaku transaksi elektronik baik itu penjual, pembeli serta *platform marketplace* untuk menciptakan transaksi elektronik yang aman, andal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kejahatan atau pelanggaran di dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana pengaturan transaksi elektronik *illegal* melalui *platform* Tokopedia dalam sistem hukum pidana Indonesia pada saat ini belum memiliki kebijakan

dan ketentuan yang khusus untuk mengatur mengenai perbuatan transaksi elektronik *illegal* hal tersebut dapat dilihat dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan UU ITE dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku kejahatan transaksi elektronik *illegal*.

2. Tokopedia sebagai penyedia layanan sistem dan transaksi elektronik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagaimana Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, selain itu di dalam *terms and condition* yang dimiliki oleh Tokopedia pada poin R dipertegas bahwa para pengguna setuju dan sepakat melepaskan segala bentuk pertanggungjawaban terhadap Tokopedia maka dalam hal ini Tokopedia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Saran

1. Indonesia dalam hal kebijakan hukum pidana pengaturan transaksi elektronik illegal melalui *platform* Tokopedia harus mengatur secara khusus dan implisit mengenai perbuatan transaksi elektronik *illegal* agar terciptanya kepastian hukum dan juga untuk mengusahakan atau membuat serta merumuskan perundang-undangan pidana yang baik.
2. Perlu adanya kerjasama dari setiap lapisan yaitu pemangku *platform* dalam hal ini Tokopeida, Pemerintah dalam hal ini ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO), dan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mempertegas tanggungjawab hukum penyedia *platform*, dengan demikian maka terdapat landasan yuridis bagi pertanggungjawaban hukum atas kesalahan dan kelalaian pengelolaan *platform* yang dapat menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Aswan. (2019). Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Guepedia.
- Barda Nawawi Arief. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sigid Suseno. (2012). Yuridiksi Tindak Pidana Siber, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Rajawali Pres.

Jurnal Hukum

- Hasan Basri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem

Peradilan Pidana Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2 (2),

Artikel dari internet

- Dewaweb Team, "Online Shop, Marketplace, dan E-Commerce". (2021). (<https://www.dewaweb.com/blog/online-shop-marketplace-dan-e-commerce-apa-bedanya/>) diakses pada 12/04/2021.
- Nur Lella Junaedi, "5 Daftar marketplace paling unggul 2020 di Indonesia". (2021). (<https://www.ekrut.com/media/marketplace-paling-unggul-2020>) diakses pada 12/04/2021.
- Tokopedia Term and Condition. (2021) (<https://www.tokopedia.com/terms>) diakses pada 21/05/2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Computer Misuse Act (CMA) CHAPTER 50A Revised Edition 2007.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perbuatan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor : 165/Pid.Sus/2020/PN Jakarta Utara.

Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor : 1455/Pid.Sus/2019/PN Jakarta Utara.